

# JOHNNY G PLATE

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'rif

RAKYAT MERDEKA - 9 Jan '19 (2)

## Kasusnya 20 Tahun Lalu, Jokowi Belum Jadi Walikota

**BUYA Syafii menilai penegakan kasus HAM di era Jokowi dianggap masih lemah. Apa tanggapan Anda atas penilaian tersebut?**

Masalah HAM yang mana? Eranya Pak Jokowi ini justru berpihak pada HAM kok. Lembaga-lembaga adat diperkuat, perhutanan sosial dilaksanakan, sehingga keberpihakan negara terhadap lahan usaha masyarakat itu tinggi. Jutaan hektare lahan usaha itu diberikan kepada masyarakat, dan dibiarkan untuk dikelola oleh masyarakat. Berarti pemerintah itu berpihak pada masyarakat.

Hak usaha untuk mengelola lahan itu dijaga betul oleh pemerintah. Lalu ada juga soal partisipasi perempuan. Program PKH (Program Keluarga Harapan), program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dan sebagainya itu sangat berpihak kepada masyarakat. Peran perempuan pun terus ditingkatkan selama Pak Jokowi-JK melaksanakan pemerintahannya.

**Tetapi hingga kini kasus pelanggaran HAM berat masa lalu belum juga tuntas. Padahal itu menjadi salah satu janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Itu bagaimana?**

Pak Jokowi-JK dan Kiai Ma'rif ini kan tidak tersangkut sama sekali dengan kasus HAM berat. Mereka sama sekali tidak tersangkut, dan mereka tentu membantu menyelesaikan secara adil. Pak Jokowi akan terus berusaha, supaya masalah HAM berat masa lalu itu bisa diselesaikan secara adil. Tapi hal itu tidak bisa dipaksakan. Karena apa? Karena harus melalui rekonsiliasi sosial yang berkeadilan. Itu tidak bisa dipaksa-paksa. Nah, Pak Jokowi, Kiai Ma'rif, serta Pak Jusuf Kalla tidak punya masalah pelanggaran HAM berat. Pak JK bahkan menjadi negosiator untuk menyelesaikan kasus HAM di Aceh.

Dengan pengalaman yang begitu luas, dia terus berusaha menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Kalau mau evaluasi, evaluasilah programnya. Jangan hanya evaluasi Jokowi-JK, dan yang jadi paslon itu Jokowi-Ma'rif.

**Tetapi kenyataannya banyak kasus HAM berat masa lalu yang**



**belum selesai. Bahkan di era Jokowi muncul kasus kriminalisasi terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang hingga kini juga belum terungkap?**

Memang, tapi itu belum selesai karena memang tidak gampang. Marsinah dan Munir itu dari zamannya presiden siapa itu belum selesai? Sudah berapa presiden tuh tapi belum selesai juga? Memang eranya Jokowi sendiri? Kan tidak, sudah ada beberapa presiden yang mengurus kasus ini, tapi belum juga tuntas. Kalau soal kasus Novel Baswedan itu kasus kriminal. Aparat harus selesaikan. Kami dari TKN, termasuk Pak Jokowi dan Kiai Ma'rif berharap aparat hukum bergerak menuntaskan kasusnya. Dengan menggunakan aturan dan norma hukum yang ada, tidak boleh diintervensi. Berikan keleluasaan kepada kepolisian untuk mengerjakannya secara profesional. Tapi apa yang ingin dilakukan dari mereka? Intervensi. Kalau presiden intervensi di kasus Novel Baswedan, demi keadilan hukum, maka kasus lainnya juga harus diintervensi. Kalau itu terjadi dan semuanya diintervensi presiden, maka hukum tidak lagi jadi

panglima. Kita kan ingin pemerintahan yang demokratis dengan berlandaskan hukum, bukan pemerintahan otoriter. Kalau hukum diintervensi itu bukan lagi negara hukum. Dulu kita melaksanakan reformasi supaya pemerintahan kita demokratis. Jadi jangan ditarik kembali, memperjuangkan gaya kepemimpinan yang otoriter.

**Memang sejauh ini apa saja upaya yang sudah dilaksanakan guna menuntaskan kasus HAM masa lalu?**

Macam-macam usahanya, silakan tanya sendiri sama polisi, tanya sendiri pada tim-tim yang bekerja. Masak semuanya presiden yang harus mengurus. Kasus Novel harus diurus, pembunuhan sana, pembunuhan sini harus diurus, kan enggak bisa.

Kan ada pejabat-pejabat yang bertugas melakukan hal itu.

Presiden ini kan kepala negara dan kepala pemerintahan. Masalah yudisial kita harus biarkan berjalan secara independen, dan bebas tekanan dari eksekutif. Dia harus berjalan independen dengan tidak diintervensi oleh eksekutif.

**Berarti bukannya enggak mau intervensi ya?**

Bukan enggak mau, salah kalau bilang enggak mau. Tapi pemerintah memang tidak boleh mengintervensi *judicial system*, itu bagaimana negara demokrasi dan hukum berjalan. Kalau mau dan melakukan intervensi atas hukum itu negara otoriter. Diktator itu namanya, tidak boleh. Jadi mau pemerintah otoriter atau demokratis? Kalau otoriter gampang, presiden langsung perintahkan saja, tangkap orang itu mau benar atau tidak. Tangkap dulu biar puas orang-orang. Kalau di negara demokratis yang begitu tidak boleh, harus ikut proses hukum.

Di negara demokratis itu bisanya dengan cara memberikan pengawasan politik, berikan evaluasi dalam sidang kabinet, bagaimana supaya efektif pelaksanaan hukumnya, disediakan anggarannya. Itu yang harus dilakukan, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintahannya Pak Jokowi. Terkait kasus HAM masa lalu, seperti Marsinah dan Munir tidak didiamkan, pasti sudah diperiksa prosesnya sampai dimana. ■ NDA